

# **EFEKTIVITAS PROGRAM *REWARD* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN-PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KEDIRI**

**Iska Fitriani Ambarwati**

12040674017 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: iskafitrian01@gmail.com

**Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.**

0023128303 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: vita.unesa@yahoo.com

## **Abstrak**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang meliputi pajak pusat dan pajak daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya selalu memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2), tetapi pada kenyataannya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) sering terjadi adanya keterlambatan dalam pelunasan. Keterlambatan pelunasan inilah yang menjadikan munculnya permasalahan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Keterlambatan dalam pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya kedisiplinan atau ketegasan pihak aparaturnya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2). Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten Kediri membuat suatu program yaitu program *reward* atau pemberian hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2). Dalam pelaksanaan program *reward* tersebut, perlu diukur keefektifannya dengan menggunakan indikator-indikator dari Ghazali (dikutip Sakti, 2015) yang terdiri dari: (1) *Input*, (2) *Proses*, (3) *Output*. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai efektivitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner, observasi, dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cluster Sampling* (Area Sampling). Sampel yang digunakan berjumlah 78 aparaturnya desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data kuantitatif dan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator termasuk kedalam indikator efektif yaitu indikator *Input* (75,99%), *Proses* (72,65%), *Output* (67,69%). Sehingga diperoleh prosentase rata-rata efektivitas program *reward* sebesar 73,4% yang berada pada kategori efektif, yang artinya program *reward* di Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan efektif.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Program *Reward*, PBB-P2

## Abstract

Tax is one of the largest source of income in Indonesia which include central taxes and local taxes. In this case the local government every year always have a target in land and building tax receipts Rural-Urban (PBB-P2), but in fact in carrying out land and building tax collection Rural-Urban (PBB-P2) is often the case of a delay in repayment. Delay in repayment is what makes the emergence of problems or constraints experienced by the Government of Kediri. Delays in the payment of Property Tax Rural-Urban (PBB-P2) occurs due to several factors: a lack of public awareness of the importance of paying taxes and the lack of discipline and firmness in implementing the party apparatus and Building Tax collection Rural-Urban (PBB-P2). In response to these problems, Kediri district government to create a program that rewards or gifts program for the settlement of land and building tax for Rural-Urban (PBB-P2). In the implementation of the reward program, its effectiveness needs to be measured using indicators of Ghozali (cited Sakti, 2015) which consists of: (1) Input, (2) processes, (3) Output. Therefore, this study raised the formulation of the problem regarding the effectiveness of reward programs in the collection of taxes on land and building rural- urban (PBB-P2) in Kediri.

This research uses descriptive quantitative research with data collection technique questionnaires, observations, and interviews. The sampling technique used in this study is Cluster Sampling (Sampling Area). The sample was 78 village officials. Data analysis techniques used in this research include analysis of quantitative data and descriptive data analysis. The results showed that of each of the indicators included in the effective indicator is an indicator Input (75.99%), process (72.65%), Output (67.69%). Thus obtained the average percentage of reward program effectiveness 73.4%, which is the category of effective, which means the reward program in Kediri has been going well and effectively.

**Keywords:** Effectiveness, Reward Programme, PBB-P2

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013:12).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah saat ini memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, berarti keseluruhan kewenangan dalam hal pemungutan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Yang mana dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Kebijakan tersebut diperuntukan untuk seluruh daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dimana Kabupaten Kediri pada tahun 2009 pernah mendapatkan peringkat kedua Jawa Timur dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pada tahun 2011 mendapatkan peringkat pertama Jawa Timur dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kediri adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun 2011-2015, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Kediri**

Tahun	Baku Sementara	Realisasi	Prosen
2011	25.137.854.192	36.877.132.500	146,70 %
2012	15.914.978.146	42.183.308.540	265,05 %
2013	51.735.916.893	51.397.456.192	99,35 %
2014	59.116.978.287	58.758.940.351	99,39 %
2015	62.970.309.921	61.901.907.063	98,30 %

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri 2015 (data diolah)

Dalam hal ini pemerintah daerah setiap tahunnya selalu memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) yang mana merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melihat potensi yang dimiliki maka pemerintah Kabupaten Kediri terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2), karena dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) sering terjadi adanya berbagai hambatan yaitu keterlambatan dalam pelunasan (PBB-P2). Keterlambatan pelunasan inilah yang menjadikan munculnya permasalahan atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Keterlambatan dalam pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya kedisiplinan atau ketegasan pihak aparaturnya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Bapak Ahmad Safi'i selaku staf pada bagian perencanaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri yang menjelaskan bahwa:

“Awal mula diadakannya perangkungan ini karena keterlambatan masyarakat dalam membayar pajak mbak, dan keterlambatannya ini biasanya dari pihak desanya yang pada tanggal jatuh tempo masih belum melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena petugas desanya yang kurang disiplin atau karena wajib pajaknya yang kurang kesadaran untuk membayar pajak, yang pasti program ini dibuat oleh pemerintah untuk memotivasi aparaturnya agar lebih meningkatkan kinerjanya mbak”.

Adanya berbagai permasalahan penyebab keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan inovasi atau upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) melalui program *reward* atau pemberian hadiah. Program tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2011 yang mana bertujuan untuk merangsang desa dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) tepat pada waktunya sehingga di harapkan program tersebut dapat mengatasi permasalahan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2).

Seiring dengan di terapkannya program *reward* atau pemberian hadiah di Kabupaten Kediri, sedikit banyak telah memunculkan beberapa pendapat dari masyarakat khususnya aparaturnya desa, yang mana diantaranya ada yang mendukung atau setuju dengan adanya program *reward* atau pemberian hadiah dan banyak juga keluhan dari aparaturnya desa khususnya yang mempunyai nilai baku Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) tinggi yang merasa keberatan atas program tersebut.

Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “ Efektivitas Program *Reward* Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan agar masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program *Reward* Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri”.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Program *Reward* Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri.

## MANFAAT

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang ilmu administrasi negara khususnya mengenai kajian efektivitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri .

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

#### b) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi, sehingga temuan yang mungkin ditemukan sedikit banyak bisa memberikan manfaat dan bahan perbaikan maupun pengembangan terkait pelaksanaan program *reward*.

#### c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh peneliti terutama pada masalah yang berkaitan dengan program *reward* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan target pembayaran

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2).

#### d) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai program *reward*, yang mana program tersebut dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan daerahnya, serta diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan motivasi pada masyarakat untuk dapat ikut serta mendukung program dari pemerintah.

## KAJIAN PUSTAKA

Istilah efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, dalam hal ini meliputi pencapaian program ataupun kegiatan. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Mahmudi (2013) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan pengertian dari pada efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”

Bila suatu tujuan dapat dicapai maka dapat dikatakan bahwa program atau kegiatan tersebut efektif. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) program atau kegiatan yang dinilai efektif, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Selanjutnya Menurut Ghozali (dikutip Sakti, 2015) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan dapat di ukur dengan:

#### 1. *Input* ( masukan)

- a) Ketepatan sasaran
- b) Tingkat sosialisasi
- c) Tujuan kegiatan

#### 2. Proses

- a) Ketepatan pemanfaatan
- b) Kecepatan respon
- c) Tingkat pemantauan

#### 3. *Output* (keluaran)

- a) Pelayanan yang diberikan
- b) Persepsi publik
- c) Perubahan perilaku wajib pajak

Pada penelitian efektivitas program *reward* dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri, menggunakan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Ghozali (dikutip Sakti, 2015) antara lain meliputi *input*, proses, *output*. Dimana dari ketiga indikator tersebut dirasakan tepat untuk dijadikan tolok ukur efektivitas program *reward*.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Cluster Sampling* (Area Sampling). Sampel yang digunakan berjumlah 78 responden yang diambil dari 78 desa. Skala pengukuran dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data kuantitatif dan analisis data deskriptif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner kepada 78 responden menunjukkan bahwa responden terbanyak berdasarkan data jenis kelamin yaitu terdapat 61 aparatur desa yang berjenis kelamin laki-laki atau 78,2%, dan 17 aparatur desa atau 21,8% berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan yaitu didominasi oleh pendidikan terakhir SLTA sebesar 47 aparatur desa atau 60,26%, dan untuk sisanya terbagi dalam pendidikan terakhir SLTP, S1, dan S2.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri dengan menggunakan pengukuran efektivitas dari Ghozali (dikutip Sakti, 2015) yang meliputi tiga indikator yaitu *Input*, Proses, dan *Output*.

**Tabel 4.24**

**Hasil Pengukuran Skor Jawaban Responden Tiap Indikator**

No	Indikator	Prosentase Skor Jawaban	Kategori
1	<i>Input</i>	75,99%	Efektif
2	Proses	72,56%	Efektif
3	<i>Output</i>	67,69%	Efektif

##### 1. *Input*

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 78 responden, pada indikator *input* ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 75,99% yang berada pada kategori efektif. Sehingga dapat dikatakan

bahwa program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik. Seperti ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan tujuan kegiatan telah sesuai dengan yang diharapkan.

##### 2. Proses

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 78 responden, pada indikator proses ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 72,56% yang berada pada kategori efektif. Berarti hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan program, kecepatan respon, dan pemantauan program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

##### 3. *Output*

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 78 responden, pada indikator *output* ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 67,69% yang berada pada kategori efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri telah berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau tujuan program.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan data yang kemudian diolah secara sistematis yang menunjukkan bahwa prosentase skor jawaban variabel efektivitas program *reward* dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri adalah sebesar 73,4% dan termasuk dalam kelas interval 61% - 80% yang berarti masuk dalam kategori Efektif.

Hasil tersebut tidak terlepas dari perolehan perhitungan skor jawaban pada masing-masing indikator pengukuran variabel efektivitas program *reward*, yang semuanya berada pada kategori efektif. Indikator pertama yaitu *input* memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 75,99% masuk kedalam kategori Efektif, indikator yang kedua yaitu

proses memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 72,56% masuk kedalam kategori Efektif, dan indikator yang ketiga yaitu *output* memperoleh prosentase skor jawaban sebesar 67,69% masuk kedalam kategori Efektif.

## SARAN

Bertitik tolak dari hasil penelitian dilapangan, secara keseluruhan program *reward* yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kediri sudah berjalan dengan efektif, sehingga peneliti menyarankan bagi pemerintah Kabupaten Kediri untuk mempertahankan apa yang sudah ada dan lebih meningkatkan kinerjanya untuk tetap menjaga dan mempertimbangkan segala kebijakan yang dibuat. Namun, ada beberapa saran juga dari peneliti yang bersifat membangun dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukkan dalam meningkatkan program *reward* untuk kedepannya, antara lain:

Pemerintah Kabupaten Kediri selaku pembuat kebijakan, perlu kiranya mengkaji ulang terkait program *reward*. Karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan tujuan dan manfaat program *reward* sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan (PBB-P2) juga masih kurang. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya membayar pajaknya secara tidak langsung juga mempengaruhi kecepatan respon masyarakat dalam pelunasan membayar pajak. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten Kediri khususnya pada bagian pembuatan kebijakan, ada baiknya mengkaji ulang terkait sasaran, tujuan, dan manfaat sehingga hasil yang di dapat sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Buku, Jurnal, dan Skripsi

- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “ Eka Taruna Bhakti “ Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal ekonomi dan sosial input. Volume 2 No.1
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Hermansyah, A. Andi. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makasar*. Makasar : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI
- Munawir. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Pradita, D. Ferian. 2013. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Profil Kabupaten Kediri tahun 2015
- Sakti, M. Yovi. 2015. *Efektivitas Drop Box Sebagai Sarana Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
- Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (cet. 9). Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Daftar Rujukan Undang-Undang dan Dokumen Resmi Pemerintahan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### **Daftar Rujukan Online**

<http://www.pajak.go.id> (diakses tanggal 10 Oktober 2015)

<http://www.hapraindonesia.co/2013/04/pemkab-kediri-tutup-mata-pbb-hampir.html?m=1> (diakses tanggal 24 Oktober 2015)